

**BAB IV**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2016**

**4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

**Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera**

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Tentram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum.
- Selain itu, sejahtera lahir dan batin juga dapat dijabarkan mengandung unsur-unsur religius, maju dan adil. Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan beribadah sesuai agamanya dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam

meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan Empat Pilar. Empat Pilar tersebut, merupakan misi pertama sampai dengan misi ke empat yang merupakan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas,
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, dan
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 memiliki tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang di jabarkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM; dan
- b. Meningkatnya akses pasar produk UMKM.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM; dan
- b. Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan
- b. Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM.

2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas.

Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
- d. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

Strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Perbaiki ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
- b. Perbaiki ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. Perbaiki ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
- d. Perbaiki kualitas manajemen pendidikan.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
  - c. Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
  - d. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan.
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
- Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
  - b. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; dan
- c. Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
- b. Pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD;
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan;
- d. Penurunan angka kesakitan;
- e. Peningkatan mutu sumber daya kesehatan;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan;
- g. Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
- h. Peningkatan gizi masyarakat;
- i. Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga;
- j. Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
- k. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih; dan
- l. Pengendalian pertumbuhan penduduk.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD;

- c. Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan;
  - d. Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular;
  - e. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan;
  - f. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan;
  - g. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
  - h. Meningkatkan cakupan pengetahuan gizi;
  - i. Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan;
  - j. Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
  - k. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - l. Meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri;
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
- c. Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sektor industri;
- b. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
- c. Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha;
- b. Meningkatkan jejaring pemasaran;
- c. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
- d. Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja; dan
- e. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan.

5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian Daerah; dan
- b. Peningkatan peran sektor pertanian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata;
- b. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan; dan
- c. Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sektor pariwisata;
- b. Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif;
- c. Peningkatan pengawasan barang bersubsidi ;
- d. Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor; dan
- e. Revitalisasi pertanian.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata;
- b. Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif;
- c. Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi;
- d. Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor; dan
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan.

6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis; dan
- d. Perwujudan tertib pertanahan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup;

- d. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis; dan
- g. Meningkatkan pengelolaan pertanahan.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah;
- b. Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas;
- c. Pemanfaatan energi terbarukan;
- d. Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni;
- e. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian;
- i. Pendayagunaan rencana tata ruang; dan
- j. Peningkatan kepastian hukum atas tanah.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air;
- c. Meningkatkan manajemen transportasi;
- d. Melakukan penghematan energi tidak terbarukan;
- e. Melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Meningkatkan tutupan lahan;
- g. Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana;
- i. Meningkatkan pengendalian pertambangan;
- j. Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu;
- k. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Menyelenggarakan penataan ruang; dan
- m. Meningkatkan penatagunaan tanah.

7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
- c. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatkan kinerja SDM legislatif;
- e. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi;
- h. Meningkatkan pelayanan bidang ketransmigrasian;
- i. Meningkatkan pelayanan pimpinan daerah;
- j. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah;
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- l. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- m. Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan;
- b. Peningkatan pemenuhan data statistik;
- c. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih;
- d. Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian;
- e. Peningkatan pengendalian pembangunan;
- f. Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda;
- g. Peningkatan pendidikan SDM legislatif;
- h. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- i. Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa;
- j. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- k. Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi;
- l. Peningkatan kesempatan kerja antar daerah;
- m. Peningkatan kinerja pemerintahan;
- n. Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah;
- o. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- p. Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan;
- q. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- r. Percepatan penanganan bencana.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik;
  - c. Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur;
  - d. Meningkatkan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
  - e. Meningkatkan pengendalian pembangunan;
  - f. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM;
  - g. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif;
  - h. Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
  - i. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  - j. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
  - k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan;
  - l. Memperluas kesempatan kerja antar daerah;
  - m. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
  - n. Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah;
  - o. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
  - p. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan;
  - q. Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah; dan
  - r. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana.
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat;
- b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah;
- c. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan;
- d. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial; dan
- e. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah;

- c. Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya;
- d. Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan
- e. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba;
- f. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- g. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak;
- h. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa; dan
- i. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama;
- b. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal;
- c. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional;
- d. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya;
- e. Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda ;
- f. Penguatan moral pemuda;
- g. Penurunan jumlah keluarga miskin ;
- h. Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal;
- i. Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma;
- j. Penyediaan sarpras panti singgah;
- k. Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial;
- l. Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- m. Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan;
- n. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- o. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak;
- p. Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi;
- q. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa;
- r. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat; peningkatan pengetahuan aparat pemerintah desa; dan
- s. Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan;

- b. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
- c. Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah;
- d. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda;
- f. Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba
- g. Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin;
- h. Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal;
- i. Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia;
- j. Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial;
- k. Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial;
- l. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- m. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- n. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- o. Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- p. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- q. Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat;
- r. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa; dan
- s. Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Keselarasan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian  
Misi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
1. Pemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan	a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		b. Meningkatnya akses pasar produk UMKM	Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM	Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal	a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah
		b. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas
		c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas
		d. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien	Perbaikan kualitas manajemen pendidikan	Mengoptimalkan pelayanan pendidikan

<b>Misi (1)</b>	<b>Tujuan (2)</b>	<b>Sasaran (3)</b>	<b>Strategi (4)</b>	<b>Arah Kebijakan (5)</b>
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	- Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan
			- Pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD	- Meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD
			- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan	- Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan
			- Penurunan angka kesakitan	- Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular
			- Peningkatan mutu sumber daya kesehatan	- Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan
			- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan
			- Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AID dan PMS
			b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	- Peningkatan gizi masyarakat
	- Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga	- Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan		
	- Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil	- Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil		
- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat			
	2. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana

<b>Misi (1)</b>	<b>Tujuan (2)</b>	<b>Sasaran (3)</b>	<b>Strategi (4)</b>	<b>Arah Kebijakan (5)</b>
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh	Pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja	a. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Peningkatan kinerja sektor industri	- Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha Meningkatkan jejaring pemasaran
		b. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja	- Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja - Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja
		c. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja	Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi	Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing	1. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah	a. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata	Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata
		b. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	- Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif	- Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif
			- Peningkatan pengawasan barang bersubsidi - Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor	- Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi - Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor
	2. Peningkatan peran sektor pertanian	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Revitalisasi pertanian	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	a. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan	- Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah	- Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah - Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air
			- Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen transportasi
			- Pemanfaatan energi Terbarukan	Melakukan penghematan energi tidak terbarukan
		b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni	Melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman

<b>Misi</b> <b>(1)</b>	<b>Tujuan</b> <b>(2)</b>	<b>Sasaran</b> <b>(3)</b>	<b>Strategi</b> <b>(4)</b>	<b>Arah Kebijakan</b> <b>(5)</b>
	2. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan	a. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup	Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup	- Meningkatkan tutupan lahan - Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana - Meningkatkan pengendalian pertambangan
		b. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu
		c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
	3. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang	Menyelenggarakan penataan ruang
	4. Perwujudan tertib pertanahan	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Peningkatan kepastian hukum atas tanah	Meningkatkan penatagunaan tanah
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	- Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan	- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			- Peningkatan pemenuhan data statistik	- Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik
		b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih	Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur

<b>Misi</b> <b>(1)</b>	<b>Tujuan</b> <b>(2)</b>	<b>Sasaran</b> <b>(3)</b>	<b>Strategi</b> <b>(4)</b>	<b>Arah Kebijakan</b> <b>(5)</b>
		c. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	- Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian - Peningkatan pengendalian pembangunan - Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemma	- Meningkatkan penerapan SPIP - Meningkatkan pengendalian pembangunan - Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM
		d. Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Peningkatan pendidikan SDM legislatif	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif
	2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel - Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa	- Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil	Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan
		c. Meningkatnya pelayanan bidang ketransmigrasian	Peningkatan kesempatan kerja antar daerah	Memperluas kesempatan kerja antar daerah
		d. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

<b>Misi</b> <b>(1)</b>	<b>Tujuan</b> <b>(2)</b>	<b>Sasaran</b> <b>(3)</b>	<b>Strategi</b> <b>(4)</b>	<b>Arah Kebijakan</b> <b>(5)</b>
		e. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah
	4. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi
		b. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat	- Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan	- Melakukan penataan peraturan perundang-undangan
			- Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	- Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah
		c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Percepatan penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial	1. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama	Peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama	Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan
	2. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan
		b. Meningkatkan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	- Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah
			- Peningkatan pelestarian benda cagar budaya	- Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya
	3. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan	Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda
		b. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba	Penguatan moral pemuda	Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba

<b>Misi</b> <b>(1)</b>	<b>Tujuan</b> <b>(2)</b>	<b>Sasaran</b> <b>(3)</b>	<b>Strategi</b> <b>(4)</b>	<b>Arah Kebijakan</b> <b>(5)</b>
	4. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial	a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial	- Penurunan jumlah keluarga miskin ,	- Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin
			- Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal	- Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal
			- Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma	- Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma
			- Penyediaan sarpras panti singgah	- Meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia
			- Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial	- Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
			- Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan PMKS	- Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial
		b. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak	- Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	- Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			- Penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan anak	- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
			- Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan

<b>Misi</b> <b>(1)</b>	<b>Tujuan</b> <b>(2)</b>	<b>Sasaran</b> <b>(3)</b>	<b>Strategi</b> <b>(4)</b>	<b>Arah Kebijakan</b> <b>(5)</b>
	5. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial	a. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	- Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat			- Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat	
- Peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa			- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa	
b. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa		Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus

#### **4.2. Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan RPJMD Kudus tahun 2013-2018, RKPD tahun 2016 merupakan tahapan tahun ketiga dan keempat, dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Tahun ketiga (2015 – 2016)**

Pembangunan pada tahun ketiga diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Pada tahun ketiga, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk pengembangan fasilitasi permodalan UMKM dan perluasan pemasaran produk UMKM, peningkatan mutu pendidikan, perluasan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan infrastruktur dan sarpras penunjang, penguatan birokrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik serta pelestarian budaya daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur telah diupayakan pendekatan kewilayahan, dimana tahun 2016 diprioritaskan pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae. Fokus pembangunan tahun ketiga diarahkan untuk percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan. Sebagaimana tahun kedua yang berada pada tahap ketiga RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, maka kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada penguatan pembangunan dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja sasaran untuk mencapai tujuan pada misi pembangunan.

##### **2. Tahun keempat (2016 – 2017)**

Pada tahun keempat, fokus pembangunan mulai diarahkan pada perwujudan visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera”. Proses percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran tetap diarahkan sejalan dengan penguatan 4 (empat) pilar pembangunan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Percepatan penurunan kesenjangan antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan prasarana wilayah lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya ungkit sektor-sektor unggulan daerah dalam pembangunan yang menyeluruh. Selain itu pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64%
2. Laju inflasi sebesar 5±1%
3. PDRB Perkapita Rp 58,89 juta rupiah
4. Indeks williamson sebesar 0,79.
5. Persentase penduduk miskin sebesar 8%.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,03%

Dengan mendasarkan pada tahapan RPJMD dan sasaran pembangunan tahun 2016, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian daerah berbasis penguatan UMKM dan daya saing.
2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan).
3. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.
5. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2016 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
1.	Peningkatan perekonomian daerah berbasis penguatan UMKM & daya saing, dengan fokus pada:	Prioritas 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah	Prioritas 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
	a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.		
	b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM		
2.	Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan & kesehatan), dengan fokus pada:	• Prioritas 3: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar.	Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
	a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
	b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.		
	c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas		
	d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		
	e) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
3.	Percepatan pengurangan kemiskinan & pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus pada:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan,</li> </ul>	Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
	a) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.		
	b) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif.		
	c) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata		
	d) Pengembangan industri kecil dan menengah		
	e) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan		
	f) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.		
	g) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.		
	h) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
	i) Peningkatan pemberdayaan		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
	masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan		
4.	Optimalisasi pembangun infrastruktur yang berkeadilan, dengan fokus pada:	<p>Prioritas 4: Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah.</p> <p>Prioritas 5 : Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana</p>	<p>Prioritas 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</p>
	a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata		
	b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.		
	c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		
	d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup		
	e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan		
	f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.		
	g) Peningkatan pengelolaan pertanahan		
5.	Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:	<p>Prioritas 6: Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.</p>	<p>Prioritas 1: menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</p> <p>Prioritas 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</p> <p>Prioritas 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya</p> <p>Prioritas 8: melakukan revolusi karakter bangsa.</p>
	a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		
	b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.		
	c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.		
	d) Meningkatnya kinerja SDM legislatif		
	e) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah		
	f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil		
	g) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
	h) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika		Prioritas 9. mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
	i) Peningkatan kualitas pelayanan dalam pemberangkatan transmigran		
	j) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah		
	k) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan		
	l) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat		
	m) Peningkatan supremasi hukum di daerah.		
	n) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana		
	a) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.		
	b) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.		
	c) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan		

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan, Indikator dan Target Kinerja  
Kabupaten Kudus Tahun 2016

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan perekonomian daerah berbasis penguatan UMKM & daya saing, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.	Jumlah UMKM (unit)	11.947	Dinperindagkop dan UMKM
	b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (unit)	178	Dinperindagkop dan UMKM
2.	Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan & kesehatan), dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	APK PAUD (%)	56	Dindikpora
	b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.	APK SD/ MI/ Paket A (%)	100	Dindikpora
		APK SMP/ MTs/Paket B (%)	100	
		Bangunan SD dalam kondisi baik (%)	97,80	
		Bangunan SMP dalam kondisi baik (%)	91,70	
		Angka Putus Sekolah SD/ MI (%)	0,02	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,11	
		APK SMA/ MA /SMK/ Paket C (%)	87,5	
		Bangunan SMA dalam kondisi baik (%)	95,86	
	Angka Putus Sekolah SMA/ MA/ SMK (%)	0,12		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
		Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	60,5	
		Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	93,95	
		Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV(%)	94,81	
		Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	95,24	
	c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Angka melek huruf (%)	100	
	d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan puskesmas (%)	211,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKK</li> <li>• BLUD RSUD</li> </ul>
		Cakupan puskesmas terakreditasi (unit)	4	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	
		Cakupan pelayanan BLUD RSUD (%)	100	
		Cakupan desa siaga aktif (%)	50	
	e) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif (%)	80	BPMPKB
3.	Percepatan pengurangan kemiskinan & pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	Dinsosnakertrans
	b) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim	Nilai realisasi PMDN (milyar)	9.765	KPPT

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
	investasi yang kondusif.			
	c) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	1.347.240	Dinbudpar
	d) Pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha (%)	2	Dinperindagkop dan UMKM
		Pertumbuhan IKM (%)	0,03	
	e) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan	Jumlah pedagang di pasar tradisional	10.501	Dinperindagkop dan UMKM
	f) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Nilai Tukar Petani	106,51	Distanhut
		Peningkatan produktivitas tanaman (%)	5,90	
	g) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	Kantor Ket Pangan
	h) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan (KK)	90	Dinsosnakertrans
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan (orang)	90	
	i) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos) (%)	11,77	BPMPKB
		Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	BPMPKB
		Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada (%)	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0	BPMPKB Bag Pemdes Setda

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
4.	Optimalisasi pemb infrastruktur yang berkeadilan, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)	68,87	Dinas BPESDM
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,59	Dinhubkominfo
	b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	62,94	Dinas BPESDM
	c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentase rumah layak huni	89,19	Dinas Ciptakaru
	d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Proporsi RTH publik (%)	7	Dinas Ciptakaru
	e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	87	Dinas Ciptakaru
	f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah dokumen tata ruang	5	Bappeda Dinas Ciptakaru
	g) Peningkatan pengelolaan pertanahan	Luas lahan bersertifikat (%)	5,4	Bag pengelolaan Aset Daerah
5.	Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	93	Bappeda
	b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.	Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan	12.143	BKD

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
		prestasi		
	c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.	Persentase penyelesaian TLHP reguler	100	Inspektorat
	d) Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Jumlah Perda yang ditetapkan	18	Set DPRD
	e) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD (%)	16,16	DPPKAD
	f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Kepemilikan e-KTP (%)	96,7	Dindukcapil
	g) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan	Pengelolaan arsip secara Baku (desa/kelurahan/SKPD)	55	Kantor Perpus & Arsip
		Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat) (perpus)	175	Kantor Perpus & Arsip
	h) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Jumlah Website milik Pemkab	18	Dinhubkominfo Bagian Humas Setda
	i) Peningkatan kualitas pelayanan dalam pemberangkatan transmigran	Jumlah calon transmigran yang terlayani (KK)	30	Dinsosnakertrans
	j) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/ Audiensi Bupati di Desa / Kelurahan (kali)	33	Bag. Umum
	k) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan	Persentase fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	100	Bag Tapem
	l) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)	80	Kesbangpol
		Penurunan tindak kriminalitas di daerah(%)	40	Kesbangpol

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
				Kesbangpol Satpol PP
	m) Peningkatan supremasi hukum di daerah.	Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	Bag Hukum Setda
	n) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana	Jumlah desa tangguh bencana	28	BPBD
	d) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.	Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME (Orang)	80	Bag.Kesra
	e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi (jenis)	36	Disbudpar
		Jumlah sarana di situs pati ayam dan Taman Budaya	5	
		Jumlah Benda Cagar Budaha (BCB) yang direvitalisasi	5	
	f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi pemuda	26	Dindikpora
		Jumlah kegiatan kepemudaan	15	